

HAMBATAN RESOLUSI KONFLIK PERBATASAN ANTARA ARMENIA-AZERBAIJAN TAHUN 2016-2021

Yulinda Ambarwati Ningsih¹

Abstract: *The Nagorno-Karabakh conflict is a territory between the countries of Armenia and Azerbaijan based on the claims from both parties. The conflict escalated in 2016 then the conflict stopped after conflict resolution. However, the conflict heated up again in 2020. Therefore, it is estimated that this conflict will experience obstacles in resolving the conflict. This research used qualitative methods, and theory conflict resolution from Johan Galtung to explain the research questions. Obstacles to conflict resolution between Armenia-Azerbaijan is the objective condition of territorial integrity of Azerbaijan and Armenia refusing to recognize integrity until the signing of the second peace agreement, and the security dilemma and than subjective condition of obstacles especially the issue of political representative. And the last obstacles to the violation of the ceasefire that occurred between the both parties. This research indicate that conflict resolution efforts are still having problems so that the peace process to reach the peacemaking stage is difficult to achieve.*

Keywords: *Conflict, Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh, Obstacles, Conflict Resolution*

Pendahuluan

Dalam Hubungan Internasional salah satu konflik yang berlangsung cukup lama ialah konflik Armenia dengan Azerbaijan. Armenia dan Azerbaijan terletak di kawasan Kaukasus Selatan (Cornell, 1997) konflik antara kedua negara bekas pecahan Uni Soviet akibat perebutan wilayah yang bernama Nagorno-Karabakh. Wilayah Nagorno-Karabakh memiliki sejarah yang panjang karena menimbulkan konflik antara Armenia dan Azerbaijan. Republik Armenia dan Azerbaijan masing-masing memiliki klaim dasar atas Nagorno-Karabakh merupakan bagian dari kedua negara (Ariani, 2018).

Klaim dari Republik Armenia didukung oleh masyarakat yang tinggal di Nagorno-Karabakh dan menyebabkan kemarahan di Azerbaijan. Ditahun 1990, muncul gerakan anti-Armenia di Azerbaijan yang mengakibatkan terjadinya pembersihan etnis Armenia. Tindakan pembersihan etnis dilakukan oleh orang Azerbaijan terhadap etnis Armenia yang terjadi di Sumgait (CFR, 2022). Pada tahun 1991 Uni Soviet runtuh sehingga negara dibawah kekuasaan terdahulu mendeklarasikan kemerdekaan termasuk Nagorno-Karabakh. Namun, kemerdekaan yang diperoleh Nagorno-Karabakh secara *de facto*, Armenia dan Azerbaijan tidak mengakui keduanya.

Konflik Nagorno-Karabakh diatasi oleh OSCE Minsk Group yang dibentuk pada tahun 1994 dengan Co-Chairs yang menangani misi untuk menyelesaikan konflik antara Armenia dengan Azerbaijan. Co-Chairs beranggotakan Rusia, Perancis, dan Amerika Serikat. Co-chairs grup minsk aktif dalam menengahi pihak-pihak yang berkonflik (Askerov, 2020). Co-Chairs Minsk Group diberi tugas untuk memberi penjelasan mengenai setiap progress dalam upaya mereka dan mengatur jalannya

¹ Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : yulindaan58@gmail.com.

negosiasi antar kedua belak pihak. Maka dari itu OSCE Minsk Group diharap dapat untuk mencari solusi damai terkait konflik Nagorno-Karabakh (Alfarizi, 2021).

Gambar 1. Peta Kontrol Nagorno-Karabakh



Sumber: BBC

Konflik Antara Armenia dan Azerbaijan terjadi ditahun 1992 hingga 1993 dan ditahun 1994 konflik terhenti dengan penandatanganan gencatan senjata. Perjanjian gencatan senjata bernama Protokol Bishkek yang menjadi acuan gencatan senjata. Dalam gencatan senjata Armenia akan mengontrol 7 wilayah yang telah di okupasi dan Azerbaijan diberikan wilayah Nakhichevan dan Selatan Karabakh. Pada tahun 2016, konflik terjadi kembali melibatkan angkatan bersenjata disepanjang garis perbatasan. Penyebab konflik terjadi selama 4 hari diakibatkan penembakan yang dilakukan oleh Armenia sehingga bergesernya garis kontak (Zolyan, 2017).

Ketegangan dijalur kontak menurun setelah Armenia mengalami *revolusi beludru* dengan pergantian perdana menteri yang baru. Dibawah kepemimpinan PM baru Armenia membangun *Hotline militer* bersama Azerbaijan untuk mengurangi ketegangan. Namun, ketegangan kembali terjadi saat perdana menteri Armenia mengunjungi Artsakh dan mengatakan Artsakh adalah Armenia, pernyataan tersebut mengembalikan hubungan yang semakin buruk antar kedua negara.

Pada tahun 2020 konflik terjadi kembali antara Armenia dan Azerbaijan, perang melibatkan pasukan bersenjata antar kedua negara yang terjadi di jalur kontak (Waal, 2021). Konflik antara Azerbaijan dengan Armenia telah berlangsung secara berkelanjutan. Konflik sempat terhenti setelah resolusi konflik yang dilakukan oleh OSCE Minsk Group pada tahun 1994 yang menghasilkan kesepakatan gencatan senjata. Akan tetapi, konflik muncul di tahun 2016, membuat kesepakatan gencatan senjata gagal bertahan. Seharusnya kedua negara dapat menghormati isi kesepakatan gencatan senjata yang telah disetujui, dan membuat kesepakatan damai namun, eskalasi terjadi kembali ditahun 2020 dengan intensitas seperti, operasi militer yang telah dipersiapkan dengan cermat dan penggunaan kekuatan militer modern terjadi antara kedua negara, sehingga menyebabkan kembali gagalnya tercapainya sebuah resolusi konflik antara Armenia dan Azerbaijan (BBC, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan antara pihak Armenia dan Azerbaijan untuk penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh.

Kerangka Teori

Resolusi Konflik

Resolusi konflik adalah proses mengelola dan menegosiasikan solusi atau penyelesaian atas suatu konflik (Kristianto, 2020). Menurut Hugh miall dkk, resolusi konflik merupakan suatu proses panjang agar bentuk konflik berubah atau menjadi

transformasi yang belum bisa dikatakan selesai dengan hanya menghasilkan suatu kesepakatan (*agreement*) yang dapat menyelesaikan perbedaan kepentingan dan dapat menggeser prioritas masing-masing pihak sehingga mengarah pada berakhirnya konflik (Miall, 2002). Menurut Burton resolusi konflik ialah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang identitas dan pengakuan, serta perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Resolusi konflik menurut Simon Fisher dkk, adalah suatu upaya untuk menangani sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama diantara pihak-pihak yang berkonflik (Ekawarna, 2018).

Resolusi konflik memiliki tahap *Peacemaking*, sebuah proses penyelesaian konflik yang mengakhiri sebuah kekerasan penyebab konflik dengan cara mempertemukan atau merekonsiliasi kedua pihak yang bertikai. Pembuatan perdamaian dirancang untuk membawa pihak-pihak yang berkonflik menuju kesepakatan melalui cara-cara damai. Beberapa metode untuk mewujudkan suatu perdamaian antara lain: *Coercive*, dalam hal ini, pemerintah dapat mengeluarkan pedoman intervensi sebagai sarana pengendalian konflik yang disebabkan oleh paksaan berupa ancaman dan sanksi. Litigasi, metode resolusi konflik yang menggunakan jalur hukum sebagai penyelesaiannya. Non-Litigasi, metode ini penyelesaian konflik yang melalui lembaga non-pengadilan. Representasi dari metode ini negosiasi, mediasi maupun arbitrase terutama pada level elit.

Tahap yang kedua *peacekeeping*, merupakan proses penghentian atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga keamanan yang netral agar tidak terjadi konflik terbuka antara pihak yang terlibat kembali. Tugas *peacekeeping* meliputi memantau proses gencatan senjata, menjalankan operasi demobilisasi, pencegahan konflik, bantuan militer, perlindungan terhadap masyarakat sipil dan melaksanakan misi kemanusiaan, menyediakan penjaga keamanan di wilayah yang merupakan zona netral, pengungsi dan pemberian sanksi (Doyle, 2001). Tahap terakhir *peacebuilding* merupakan proses implementasi perubahan untuk mengembalikan keadaan akibat dari kekerasan yang terjadi agar terciptanya perdamaian yang bersinambungan.

Dalam resolusi konflik aktor-aktor memiliki peran penting dalam membangun hubungan antar pihak yang terlibat konflik. Aktor dalam hubungan internasional bisa saja merupakan *actor state* atau juga *non state actor*. *Non state actor* meliputi Pemerintahan Internasional (IGO), Organisasi Non-Pemerintah Internasional (INGO) dan perusahaan multinasional (Crocker, 2001).

Hambatan Resolusi Konflik

Licklider mengatakan bahwa perang yang diakhiri oleh penyelesaian dengan dinegosiasikan memungkinkan terjadi kembali konflik dibandingkan konflik yang diakhiri dengan kemenangan militer (Miall, 2002). Konflik begitu sulit untuk diakhiri biasanya dikarenakan sumber konflik yang tetap ada dalam bentuk yang diperkuat kedalam perang berikutnya. Beberapa konflik sulit untuk diselesaikan, sulitnya untuk menyelesaikan konflik dapat disebabkan oleh perbedaan yang mendalam antara pihak-pihak yang berkonflik. Selain faktor pendorong konflik, lemahnya atau tidak efektifnya pencapaian dan pembangunan perdamaian atau faktor pendorong perdamaian, merupakan sebab-sebab utama dari sisi lain yang menyebabkan konflik mudah terjadi. Seringkali penyelesaian tidak berjalan dengan baik sejumlah masalah potensial bisa terjadi dalam kesepakatan seperti:

Kondisi Objektif dan Kondisi Subjektif

Studi perdamaian perlu memahami sifat dari masalah untuk mengimplementasikan proses resolusi konflik. Tujuan memahami konflik adalah agar dapat merumuskan solusi yang tepat berdasarkan penyebab konflik. Kemudian ada dua hambatan untuk mencapai perdamaian.

Pertama, kondisi objektif atau sisi negara yaitu kepentingan nasional, kedaulatan wilayah dan perebutan sumber daya ekonomi. Hanya negara berdaulat yang dapat menjalankan kekuasaan atas wilayah. Kondisi objektif tersebut berkaitan dengan kepentingan atau kebijakan negara sebagai peka dalam dunia internasional dan entitas negara. Asumsinya bahwa semua tindakan negara didasarkan pada pertimbangan objektif.

Kedua kondisi subjektif atau tingkat masyarakat yaitu keinginan untuk pengakuan atas identitas tertentu, etnis, perlindungan budaya, dan masalah representasi politik. Situasi tersebut sering muncul di wilayah nasional sebagai ekspresi ketidakpuasan terhadap kebijakan nasional. Karakteristik lainnya kelompok masyarakat dianggap sebagai penentang negara. Hal tersebut adalah asimetri kepentingan antara kelompok dan kebijakan nasional yang terkait dengan faktor struktural seperti sejarah, etnis geografis, wilayah lembaga politik dan sumber daya alam (Aji, 2019).

Tidak bertahannya kesepakatan

Penyelesaian konflik biasanya membujuk pihak musuh untuk membatasi penggunaan senjata namun, tidak mudah untuk membiarkan lawan tanpa pertahanan senjata. Penyelesaian bukanlah hasil win-win untuk semua pihak yang terlibat, setiap kesepakatan damai memiliki pemenang dan yang kalah. Penyelesaian yang efektif mencakup solusi yang memiliki kekuatan untuk menggagalkan dan seringkali mengabaikan solusi lain yang mungkin lebih tepat tetapi tidak terlalu mengancam (Licklider, 2001). Dan keberhasilan seringkali bergantung pada asumsi semua pihak bahwa hal itu akan terjadi. Hal tersebut terutama berlaku untuk ketentuan politik dan keamanan, tanpa jaminan tersebut, kekerasan kemungkinan besar akan terus berlanjut.

Metode

Jenis Penelitian yang digunakan penulis ialah tipe penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini menjelaskan hambatan-hambatan dalam penyelesaian konflik antara Armenia dengan Azerbaijan dimana kemudian penulis membatasi penelitian ditahun 2016-2021. Karena ditahun 2016 konflik kembali memanas yang menyebabkan, gagalnya perjanjian gencatan senjata tahun 1994 sehingga konflik terus saja terjadi antara kedua negara dan sampai ditahun 2021 dikarenakan konflik telah terdeeskalasi. Dengan menggunakan teori resolusi konflik untuk menganalisis penyelesaian yang digunakan dalam konflik dan melihat hambatan resolusi yang berpengaruh dalam proses perdamaian. Jenis data yang digunakan penulisan ini ialah data sekunder, yaitu melalui studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku, jurnal online, laporan, website situs berita dan berbagai referensi yang terkait dengan penelitian. Adapun tempat yang akan penyusun gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah perpustakaan daerah Samarinda Kaltim dan Perpustakaan Fisip Unmul Samarinda Kaltim. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, baik itu dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Berikut data-data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan

hasil studi pustaka seperti jurnal, artikel, dokumen maupun internet yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Hambatan Kondisi Objektif

Kedaulatan wilayah

Kepentingan nasional dari Azerbaijan untuk mengembalikan integritas dan kedaulatan teritorial. Integritas dan kedaulatan teritorial berarti tidak ada negara lain yang memiliki hak untuk menjalankan kekuasaan atas wilayahnya (Karimi, 2021). Deklarasi kemerdekaan dan okupasi yang dilakukan oleh Armenia atas Nagorno-Karabakh telah melanggar integritas teritorial Azerbaijan. Pemerintah Azerbaijan tidak akan mengakui integritas teritorial Armenia sampai penandatanganan perjanjian damai yang diusulkan oleh Azerbaijan. (Makaryan, 2022). Pemerintah Armenia sejak lama menyatakan tidak akan mengakui integritas wilayah Azerbaijan hingga konflik Nagorno-Karabakh selesai (Coe int, 2001).

Upaya diplomatik untuk mengakhiri permusuhan antara Armenia dan Azerbaijan atas wilayah Nagorno-Karabakh ditentang oleh penolakan perdana menteri Armenia untuk berpartisipasi dalam negosiasi di bawah format grup Minsk dan menolak bentuk negosiasi yang tidak memasukkan pengakuan hak atas penentuan nasib sendiri. Bagi presiden Azerbaijan kesepakatan damai didasarkan pada lima poin yaitu:

1. Saling mengakui kedaulatan masing-masing, integritas teritorial, perbatasan internasional yang tidak dapat diganggu gugat, dan kemerdekaan politik;
2. Konfirmasi timbal balik tentang tidak adanya klaim teritorial oleh negara satu sama lain, serta kewajiban hukum untuk menahan diri dari membuat klaim tersebut di masa depan;
3. Menahan diri untuk tidak mengancam keamanan satu sama lain dalam hubungan antar negara, menggunakan ancaman dan kekerasan terhadap kemerdekaan politik dan integritas teritorial, dan tidak bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan Piagam PBB;
4. Delimitasi dan demarkasi batas negara, serta pembentukan hubungan diplomatik;
5. Pembentukan komunikasi dan kerja sama lain yang relevan di bidang lain yang menjadi kepentingan bersama, serta pembukaan transportasi dan komunikasi.

Kesepakatan damai didasari oleh lima elemen dan termasuk mengakui integritas teritorial satu sama lain. Presiden Azerbaijan menolak solusi apapun yang mengarah pada kepemilikan wilayah yang diklaim oleh Armenia. Pemerintah Armenia menanggapi dengan mengatakan, tidak akan menandatangani kesepakatan damai dengan Azerbaijan tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengan etnis Armenia di Nagorno-Karabakh. Armenia mengadopsi kebijakan untuk memahami bahwa perdamaian tidak hanya bergantung pada Republik Armenia tetapi harus melibatkan masyarakat Nagorno-Karabakh. Perdana Menteri yang baru telah mengadopsi kebijakan era pembangunan damai untuk wilayah Nagorno-Karabakh.

Dilema Keamanan

Untuk menjaga kedaulatan membuat Armenia dan Azerbaijan meningkatkan kekuatan militer sehingga menyebabkan dilema keamanan. Peningkatan tersebut untuk mempertahankan atau mengambil kembali wilayah Nagorno-Karabakh yang diokupasi oleh Armenia. Konflik antara Armenia dan Azerbaijan, atas wilayah Nagorno-Karabakh terus membuat militerisasi di Kaukasus Selatan berada pada tingkat yang sangat tinggi. Untuk mempertahankan kedaulatan maka Azerbaijan meningkatkan militer dengan

membeli persenjataan modern. Peningkatan dalam bidang militer Azerbaijan memiliki tujuan nasional yaitu merebut kembali wilayah Nagorno-Karabakh (Kofman, 2020). Selain Azerbaijan, republik Armenia mempersenjatai militernya untuk menjaga wilayah yang dikuasai agar tetap aman dan mencegah jika adanya serangan musuh. Keadaan tersebut merupakan kepentingan wilayah dan kedaulatan Armenia. Posisi pertahanan Armenia mengalami penurunan sehingga, menjadikan pihak yang lemah dalam konflik dari Azerbaijan (Mikaelian, 2017).

Tabel 1 Perbandingan Kekuatan Militer Armenia dan Azerbaijan

Perbandingan Kekuatan Militer			
Angkatan Darat Armenia	Angkatan Darat Azerbaijan	Angkatan Udara Armenia	Angkatan Udara Azerbaijan
Tank: 288	Tank: 510	Pesawat: 64	Pesawat: 149
Kendaraan lapis baja: 673	Kendaraan Lapis Baja: 1.762	Pesawat tempur: 4	Pesawat tempur: 17
Altileri: 38	Altileri: 167 unit	Pesawat serangan khusus: 10	Pesawat serangan khusus: 11
Altileri Derek: 145	Altileri Derek: 319	Helikopter: 36	Helikopter: 87
Roket: 94	Roket: 291	Helikopter tempur: 20	Helikopter tempur: 17

Sumber: Global firepower

Menurut data indeks kekuatan militer dunia Azerbaijan memiliki keunggulan pada bidang kemiliteran, Azerbaijan menempati posisi 63 dari 142, sedangkan Armenia di urutan 98 dari 142. Jumlah armada perang kedua negara, pada Angkatan Darat jumlah tank yang dimiliki Azerbaijan 510 sedangkan Armenia 288, kendaraan bersenjata Azerbaijan 1.762 dan Armenia 673, total altileri Azerbaijan 486, Armenia 183 dan roket Azerbaijan 291 sedangkan Armenia 94. Bidang Angkatan Udara Armenia memiliki 134 armada, sedangkan Azerbaijan 281 armada (Nazaretyan, 2021).

Pembelian senjata dan menambah armada militer oleh masing-masing pihak membuat sikap saling curiga terhadap satu sama lain, dan juga menjadi kesulitan untuk menyatukan kedua pihak untuk mencapai penyelesaian secara damai. Selain hambatan objektif terdapat juga hambatan subjektif pada tingkat masyarakat Armenia dan Azerbaijan yang menyebabkan sulitnya tercapainya penyelesaian konflik yang damai.

Masalah Representasi Politik

Upaya co-chairs OSCE Minsk Group, untuk menyatukan pihak-pihak yang berkonflik tidak berjalan dengan baik. Penyelesaian secara damai dalam jangka pendek sulit dilakukan bagi masyarakat Armenia, Nagorno-Karabakh dan Azerbaijan. Posisi Nagorno-Karabakh di wakilkkan oleh Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan yang menjabat pada tahun 2018 dalam perundingan, Azerbaijan tidak menyetujui Nagorno-Karabakh ikut terlibat dalam penyelesaian. Masalah Nagorno-Karabakh telah membentuk politik di Armenia. Masyarakat Armenia menganggap kompromi sebagai ancaman terhadap keamanan (Ayunts, 2016). Status Artsakh dan tujuh wilayah sekitarnya merupakan masalah terpenting, Armenia membela hak Artsakh untuk menentukan nasib sendiri, yang berarti kemerdekaan dari Azerbaijan, tetapi Azerbaijan tidak dapat menerimanya (Novosti, 2021).

Presiden Artsakh mengatakan “pengakuan penuh atas hak orang Armenia di Artsakh untuk menentukan nasib sendiri adalah kriteria utama Nagorno-Karabakh dan tidak tunduk pada reservasi atau konsesi”. Oposisi Armenia dan pejabat Nagorno-Karabakh mengkritik Pashinyan atas pernyataan mengenai status Nagorno-Karabakh dalam konferensi pers. Pernyataan terbaru Pashinyan mengatakan “Artsakh tidak akan pernah sepenuhnya menjadi orang Armenia, dari negosiasi tersebut jelas bahwa orang Armenia dan Azerbaijan akan menetap di Artsakh, dan badan legislatif akan terdiri dari Armenia dan Azerbaijan” pernyataan tersebut diikuti oleh gelombang kritik dan kecaman dari politisi di Armenia dan Nagorno-Karabakh (JAMnews, 2021).

Kesepakatan gencatan senjata telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Menerima hasil kompromi akan beresiko pada keamanan bagi kedua negara (Bryza, 2016). Kelompok Sasna Tsrer, menentang fakta terkait wilayah-wilayah yang diakui sebagai bagian *de jure* Azerbaijan yang dianggap bagian dari perselisihan atas Karabakh tetapi menyebut sebagai tanah yang dibebaskan. Masyarakat di Azerbaijan masih belum dapat mencapai kesepakatan tentang masalah Nagorno-Karabakh, meskipun proses negosiasi semakin intens (Martirosyan, 2022). Di Azerbaijan, tingkat kesadaran masyarakat terhadap konflik Nagorno-Karabakh serta penyelesaian konflik berbeda-beda di setiap wilayah. Masyarakat Azerbaijan kurang mendapatkan informasi tentang konflik Nagorno-Karabakh dan proses perdamaian yang sedang berlangsung. Ketidaktahuan masyarakat, akibat format negosiasi top down yang membuat rakyat Azerbaijan hanya mengetahui penyelesaian konflik melalui kekerasan agar segera berakhirnya konflik. Banyak masyarakat Azerbaijan yang mendukung perang karena tidak mempercayai penyelesaian konflik dengan cepat (Grigoryan, 2019).

Pihak Azerbaijan menganut penyelesaian konflik Nagorno-Karabakh dengan cara damai, namun menurut peneliti Azerbaijan bahwa penyelesaian konflik dengan cara berperang lebih populer di masyarakat. Karena format pendekatan penyelesaian konflik top down itulah yang membuat masyarakat Azerbaijan hanya mengetahui cara kekerasan untuk menyelesaikan konflik Nagorno-Karabakh. Sehingga saat proses penyelesaian dimulai, bisa saja masyarakat melakukan tindakan kekerasan kembali yang membuat goyahnya proses penyelesaian konflik dan mengganggu gencatan senjata yang telah disetujui untuk menghentikan perang.

Hambatan Pelanggaran Gencatan Senjata

Penyelesaian konflik memiliki masalah seperti runtuhnya sebuah kesepakatan yang telah disetujui. Dalam konflik Nagorno-Karabakh terdapat perjanjian yang disepakati untuk menghentikan perang yaitu Gencatan Senjata. Dalam resolusi tersebut berisi penghentian semua permusuhan, tindakan kekerasan segera membangun sebuah gencatan senjata yang bertahan lama, menahan diri dari setiap tindakan yang dapat menghalangi penyelesaian masalah secara damai, penarikan pasukan Armenia dari wilayah kependudukan Azerbaijan, dan mendesak para pihak untuk melanjutkan penyelesaian konflik dalam kerangka OSCE. Perjanjian gencatan senjata merupakan pencapaian nyata dalam proses penyelesaian konflik Armenia dan Azerbaijan, meskipun mempertahankan sulit untuk dicapai. Para pihak mendeklarasikan gencatan senjata yang berisi menghentikan permusuhan mulai tengah malam, penarikan pasukan bersenjata dari wilayah yang diokupasi, pembukaan infrastruktur dan pemulangan pengungsi (Azzam, 2020).

Sejak pertengahan Januari, insiden penggunaan senjata artileri berat dan anti-tank terjadi, pada Februari Azerbaijan telah melanggar rezim gencatan senjata lebih dari 120 kali atau sekitar 2.200 tembakan kearah posisi Armenia di sepanjang garis kontak

Artaskh-Azerbaijan (Mediamax, 2017). Azerbaijan mengklaim bahwa Armenia yang telah menyerang lebih dahulu, sedangkan tentara pertahanan Karabakh mengatakan pasukan Azerbaijan menggunakan mesin penjinak ranjau dan senjata lainnya untuk merebut posisi garis depan (Azatuyun, 2017). Pertempuran April antara kedua belah pihak secara terus-menerus meningkatkan penggunaan artileri berat dan senjata anti-tank (Reuters, 2017). Pada 4 Juli 2017 pukul 20:00, Armenia melakukan provokasi angkatan bersenjata dengan menembakkan pelontar ranjau serta granat, ke di distrik Fuzuli Azerbaijan yang melanggar rezim gencatan senjata (Embassy, 2017).

Pelanggaran-pelanggaran yang terus terjadi membuat tidak bertahan lama gencatan senjata yang telah disepakati. Pada eskalasi Juli 2020, sebagai serangan Azerbaijan untuk merebut kembali setidaknya beberapa wilayah Azerbaijan yang hilang diokupasi oleh Armenia. Dua gencatan senjata yang ditengahi oleh Rusia sebelumnya gagal untuk menghentikan perang yang sedang terjadi. Gencatan senjata pertama yang berlaku pada Sabtu, setelah dicapainya kesepakatan mengenai pertukaran tahanan dan jenazah antara kedua pihak gagal bertahan (Reuters, 2020). Gencatan senjata kemanusiaan diumumkan pada Minggu dalam pernyataan bersama dari Departemen Luar Negeri AS dan pemerintah Armenia dan Azerbaijan (BBC, 2020). Armenia dan Azerbaijan saling menuduh telah melanggar gencatan senjata kemanusiaan, yang beberapa jam setelah disepakati. (Guardian, 2020). Pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh Armenia dan Azerbaijan menunjukkan bahwa ketidakinginan kedua negara menyelesaikan konflik secara damai.

Kesimpulan

Hambatan yang terjadi dalam resolusi konflik antara Armenia dan Azerbaijan didapatkan hasilnya yaitu Hambatan kondisi Objektif atau sisi pemerintah yang mana kedaulatan wilayah. Ketidaksepakatan antara kedua negara dalam membuat konsesi dan mengakui kedaulatan sebelum penandatanganan menyulitkan untuk resolusi konflik. Selain itu, untuk menjaga kedaulatan membuat Armenia dan Azerbaijan meningkatkan kekuatan militer antara Armenia dengan Azerbaijan. Lalu hambatan kondisi Subjektif terdapat masalah Representasi Politik di Armenia kesulitan untuk mencapai penyelesaian konflik yang dinegosiasikan karena penolakan dari oposisi masyarakat Armenia di Nagorno-Karabakh. Sedangkan di Azerbaijan masyarakatnya tidak banyak yang mengetahui tentang proses penyelesaian konflik secara damai dan masyarakat Azeri lebih memandang perang sebagai proses penyelesaian konflik. Kemudian pelanggaran gencatan senjata yang terjadi membuat tidak bertahannya kesepakatan oleh Armenia dan Azerbaijan, hal tersebut memperlihatkan ketidakinginan kedua pihak untuk menyelesaikan konflik secara damai, dan menyebabkan terhambatnya proses penyelesaian konflik yang komprehensif sehingga menghambatnya proses perdamaian untuk mencapai tahap *peacemaking* antara kedua negara akibat tindakan-tindakan yang membuat kembalinya ke proses oleh grup minsk.

Daftar Pustaka

- Askerov, Ali. dkk. 2020. *Post-Soviet Conflicts The Thirty Years' Crisis. Chapter "The Nagorno Karabakh Conflict The Beginning of the Soviet End."* Lexington Books. United Kingdom
- Ariani, Novinta Faradila. 2018. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Mediasi OSCE Minsk Group Pada Konflik Azerbaijan-Armenia Terkait Perebutan Wilayah Nagorno-Karabakh Tahun 2013-2016.* Universitas Brawijaya

- Alfarizi. A.M. Agung.2021.Pengaruh Military Expenditure Terhadap Konstalasi Konflik Armenia-Azerbaijan.Universitas Hasanuddin.
- Aji, M. Prakoso dan Jerry Indrawan. 2019. *Memahami Studi Perdamaian Sebagai Bagian Dari Ilmu Hubungan Internasional*. UPN Veteran.
- Azatutyun. 2017. "Deadly Fighting Reported In Karabakh", tersedia di <https://www.azatutyun.am/a/28331643.html>
- Ayunts, Artak. 2016. "What next for civil society peacebuilding post-4-day war in Nagorno Karabakh?" <https://www.civilnet.am/en/news/385090/what-next-for-civil-society-peacebuilding-post-4-day-war-in-nagorno-karabakh/>
- Azzam, M. Abdullah. 2020. "6 Pertanyaan Seputar Sengketa Karabakh di Azerbaijan." Tersedia di <https://www.aa.com.tr/id/dunia/6-pertanyaan-seputar-sengketa-karabakh-di-azerbaijan/1988939>
- Bryza, Matthew J. 2016. "Two Surprising Proposals for Peace in the Nagorno-Karabakh Conflict", tersedia di <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/two-surprising-proposals-for-peace-in-the-nagorno-karabakh-conflict/>
- BBC. 2020. "Armenia-Azerbaijan: Pertempuran Terus Berlangsung, Ada Apa di Balik Konflik di Wilayah Sengketa Nagorno-Karabakh?", tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54320700>
- Crocker, Chester A. Fan Osler Hampson dan Pamela Aall. 2001. *Turbulent Peace (The Challenges of Managing International Conflict)*. United States Institute of Peace Press. Washington, DC.
- Cornell. Svante E. 1997. *Underclared War: The Nagorno-Karabakh Conflict Reconsidered*. Journal of South Asian and Middle Eastern Studies Vol. XX, No. 4, Summer 1997, PDF
- Coe.int. 2001. "Recognition of the territorial integrity of Azerbaijan by Armenia", tersedia di <https://rm.coe.int/16804da793>
- CFR/Global Conflict Tracker. 2022. "Nagorno-Karabakh Conflict," Council on Foreign Relations", tersedia di <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/nagorno-karabakh-conflict>
- Doyle, Michael W. 2001. *War Making and Peace Making The United Nations' Post Cold War Record*. Tubulent Peace The Challenges of Managing International Conflict
- Embassy of the Republic of Azerbaijan to the Republic of Bulgaria. 2017 "Information of the Prosecutor General's Office of the Republic of Azerbaijan", tersedia di <https://sofia.mfa.gov.az/en/news/3095/information-of-the-prosecutor-generals-office-of-the-republic-of-azerbaijan>
- Ekawarna. 2018. *Manajemen Konflik dan Stress*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Grigoryan, Eleln, dkk. 2019. "Reflections on Scenarios on the Peaceful Resolution of the Nagorno-Karabakh Conflict in Armenia and Azerbaijan", tersedia di <https://caucasusedition.net/reflections-on-scenarios-on-the-peaceful-resolution-of-the-nagorno-karabakh-conflict-in-armenia-and-azerbaijan/>
- JAMnews. 2021. "Did Pashinyan"Surrender" Karabakh again?" Armenian PM'S Statements Spark Criticism", tersedia di <https://jam-news.net/did-pashinyan-surrender-karabakh-again-armenian-pms-statements-spark-criticism/>
- Karimi, S. 2021. *The Nagorno-Karabakh Conflict Is The Issue Of Territory Gaining By Armenia Not The Issue Of Self-Determination Of The People Of Nagorno-Karabakh*. University of Boras : Department Of Educational Work
- Kristanto, Andri. 2020. *Manajemen Konflik*.Cetakan I. Yogyakarta: Gava Media

- Kofman, Michael. 2020. "Perspectives | Armenia's Military Position In Nagorno-Karabakh Grows Precarious", tersedia di <https://eurasianet.org/perspectives-armenias-military-position-in-nagorno-karabakh-grows-precarius>
- Licklider, Roy. 2001. *Obstacles to Peace Settlements*. Tubulent Peace The Challenges of Managing International Conflict
- Mikaelian, Hrant. 2017. *Societal Perceptions of the Conflct in Armenia and Nagorno-Karabakh*. Caucasus Institute, Yerevan, tersedia di <https://c-i.am/wp-content/uploads/2017-Karabakh-Working-Paper.pdf>
- Mediamax.2017.*Ceasefire is violated for 120 times*, tersedia di <https://mediamax.am/en/news/karabakh/22395/>
- Makaryan, Martin. 2022. "Aliyev, A Challenge to Armenian Sovereignty And The Rules-Based World Order", tersedia di <https://journalonworldaffairs.org/2022/09/20/aliyev-a-challenge-against-armenian-sovereignty-and-the-rules-based-world-order/>
- Martirosyan, Armine. 2022. "What can Armenians of NK expect in Azerbaijan? Azerbaijan scholar's forecast." Tersedia di <https://jam-news.net/what-can-armenians-of-nk-expect-in-azerbaijan-azerbaijani-scholars-forecast/>
- Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhous. 2002 *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Terjemahan.Ed. 1, Cetakan 2. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Novosti, Ria. 2021. "Nikol Pashinyan's Imprint on the 2020 Karabakh War: Did He Instigate the War?", tersedia di <https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/columns/eurasian-policy/nikol-pashinyan-s-imprint-on-the-2020-karabakh-war-did-he-instigate-the-war/>
- Nazaretyan, Hovhannes. 2021. "Arms Supplies to Armenia and Azerbaijan", tersedia di <https://evnreport.com/spotlight-karabakh/arms-supplies-to-armenia-and-azerbaijan/>
- Reuters.2017. "Azeri woman and child killed by Armenian forces near Nagorno-Karabakh boundary: defense ministry", tersedia di <https://www.reuters.com/article/us-armenia-azerbaijan-conflict-idUSKBN19Q1VG>
- Reuters.2020.*Shaky ceasefire in Nagorno-Karabakh after Moscow Deal*. CNBC, tersedia di <https://www.cnbc.com/2020/10/10/azerbaijan-conflict-ceasefire-in-nagorno-karabakh-after-moscow-deal.html>
- The Guardian. 2020. "Nagorno-Karabakh: Armenia and Azerbaijan accuse each other of breaking fresh truce", tersedia di <https://www.theguardian.com/world/2020/oct/17/nagorno-karabakh-armenia-and-azerbaijan-announce-new-truce-plan>
- Waal, Thomas de. 2021. *The Nagorny Karabakh Conflict in Its Fourth Decade*. CEPS Working Document. tersedia di https://www.ceps.eu/wp-content/upbads/2021/09/WD2021-02_The-Nagorny-Karabakh-Conflict-in-its-Fourth-Decade.pdf
- Zolyan, Mikayel. 2017. The Karabakh Conflict After the "Four-Day War" A Dynamic Status Quo, tersedia di <http://turkishpolicy.com/article/846/the-karabakh-conflict-after-the-four-day-war-a-dynamic-status-quo>